

BAB IV

KOLABORASI CIQAL DENGAN NGO-NGO INTERNASIONAL DALAM UPAYA ADVOKASI KAUM DIFABEL DI YOGYAKARTA

Dalam proses advokasi kaum difabel di Yogyakarta, CIQAL sebagai NGO yang bergerak dalam isu disabilitas faktanya tidak dapat mengatasi isu disabilitas di Yogyakarta tanpa melakukan kolaborasi dengan NGO-NGO Internasional yang bergerak dalam isu mikro politik. Oleh sebab itu, CIQAL telah melakukan berbagai kolaborasi dengan NGO-NGO Internasional dalam upaya mengadvokasi kaum disabilitas di Yogyakarta.

A. Keterlibatan NGO Internasional dalam Isu Disabilitas di Yogyakarta

Isu disabilitas di Yogyakarta dalam proses pengadvokasiannya tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak ada keterlibatan dari pihak luar atau keterlibatan dari NGO internasional yang lebih unggul dalam hal pengalaman penanganan isu disabilitas. Oleh karena itu keterlibatan NGO internasional dalam proses advokasi para penyandang disabilitas di Yogyakarta sangat dibutuhkan. Karena faktanya NGO-NGO lokal yang bekerja dalam isu disabilitas di Yogyakarta belum dapat menyelesaikan problem-problem para penyandang disabilitas tanpa adanya keterlibatan NGO-NGO internasional. Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas adanya isu disabilitas di Yogyakarta juga menyadari bahwa tidak dapat mengatasi problem-problem para penyandang disabilitas di Yogyakarta tanpa bantuan NGO-NGO lokal dan NGO-NGO internasional. Maka dari itu, menurut *Keck and*

Sinkkink dalam teori TAN (Transnational Advocacy Network), aktor utama dalam TAN yaitu NGO internasional dan NGO lokal muncul untuk membantu negara atau pemerintah dalam mengatasi peproblem-problem dan isu yang sedang terjadi di suatu wilayah atau daerah. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang membahas penyandang disabilitas, namun faktanya peraturan-peraturan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dialami para penyandang disabilitas di Yogyakarta.

Keterlibatan NGO-NGO internasional dalam mengatasi isu disabilitas di Yogyakarta di pengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor politik dan faktor sosial. Pertama adanya faktor politik yaitu dukungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang open dan welcome terhadap NGO-NGO internasional yang masuk ke Yogyakarta untuk membantu mengatasi masalah isu disabilitas di Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta sadar bahwa Pemerintah tidak dapat mengatasi isu disabilitas di Yogyakarta dengan baik, sedangkan para penyandang disabilitas di Yogyakarta membutuhkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas baik dari hak-hak fisik dan non-fisik. Hak-hak fisik yang dimaksudkan adalah terpenuhinya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas baik dari sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di lingkungan umum maupun khusus dalam bersosialisasi setiap hari. Sedangkan hak-hak non-fisik yaitu bagaimana cara pemerintah merubah cara pandang dan paradigma masyarakat luas terhadap isu disabilitas. Bagaimana seharusnya masyarakat memperlakukan para penyandang disabilitas dengan baik, tanpa adanya diskriminasi dimanapun dan dalam bentuk apapun. Keselamatan para penyandang disabilitas juga sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah, terlebih bagi anak-anak penyandang disabilitas dan perempuan

penyangang disabilitas. Anak-anak penyandang disabilitas dan perempuan penyandang disabilitas harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Yogyakarta. Karena faktanya perempuan penyandang disabilitas dan anak-anak penyandang disabilitas sangat rentan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual serta masalah diskriminasi dimana-mana. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Yogyakarta menerima kedatangan NGO-NGO Internasional dalam mengatasi isu disabilitas di Yogyakarta terlebih pada NGO-NGO yang bergerak dalam penanganan masalah perempuan dan anak penyandang disabilitas (Nuning, personal interview, 11 April 2018).

Dengan terbukanya Pemerintah Kota Yogyakarta dengan kehadiran dan kedatangan NGO-NGO internasional dalam mengatasi masalah isu disabilitas di Yogyakarta, menjadikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu Provinsi yang cepat dan baik dalam menangani isu disabilitas. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjadi contoh Provinsi bagi Provinsi-Provinsi lain di Indonesia dalam hal advokasi kebijakan bagi para penyandang disabilitas.

Faktor kedua yaitu faktor sosial, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang rawan dengan adanya bencana alam. Potensi bencana alam di Yogyakarta lebih tinggi daripada potensi di daerah-daerah lainnya. Yogyakarta memiliki potensi bencana alam gempa bumi yang telah terjadi pada bulan Mei tahun 2006, meletusnya gunung Merapi pada tahun 2010, dan ancaman bahaya bencana banjir yang sering menjadi ancaman bagi masyarakat di Yogyakarta. Dengan banyaknya potensi bencana alam yang ada di Yogyakarta menjadikan NGO-NGO internasional memberikan perhatian lebih kepada para penyandang disabilitas di Yogyakarta.

Rasa empati tinggi yang dimiliki oleh NGO-NGO internasional terhadap kondisi para penyandang disabilitas di Yogyakarta menjadi dorongan utama masuknya NGO-NGO internasional dan ikut terlibat dalam proses advokasi penyandang disabilitas di Yogyakarta. Fenomena gempa bumi tahun 2006 di Yogyakarta merupakan fenomena terdahsyat dalam sejarah bencana alam yang telah terjadi di Yogyakarta.

Pada tanggal 27 Mei, gempa bumi mengguncang bagian tengah wilayah Indonesia, dekat kota sejarah, Yogyakarta. Berpusat di Samudera Hindia pada jarak sekitar 33 kilometer di selatan kabupaten Bantul, gempa ini mencapai kekuatan 5,9 pada Skala Richter dan berlangsung selama 52 detik. Karena gempa berasal dari kedalaman yang relatif dangkal yaitu 33 kilometer di bawah tanah, guncangan di permukaan lebih dahsyat daripada gempa yang terjadi pada lapisan yang lebih dalam dengan kekuatan gempa yang sama, maka terjadi kehancuran besar, khususnya di kabupaten Bantul di Provinsi Yogyakarta dan Klaten di Provinsi Jawa Tengah. Gempa bumi ini adalah bencana besar ketiga yang menimpa Indonesia dalam 18 bulan terakhir di tahun 2006. Pada bulan Desember 2004, gempa bumi yang dahsyat diikuti dengan gelombang tsunami menghancurkan sebagian besar Aceh dan pulau Nias di Sumatera Utara, dan pada bulan Maret 2005, gempa bumi kembali mengguncang pulau Nias. Dengan lebih dari 18.000 kepulauan Indonesia yang berada di sepanjang “cincin api” Pasifik yang berisi banyak gunung berapi aktif dan patahan tektonik, bencana yang belakangan terjadi ini merupakan peringatan akan besarnya risiko alam yang dihadapi negara ini (BAPPENAS, 2006).

Tabel 1. Korban Jiwa dan Luka-Luka Gempa Bumi di Yogyakarta-Jawa Tengah

Provinsi dan Kabupaten	Korban Jiwa	Korban Luka-luka
Yogyakarta	4.659	19.401
Bantul	4.121	12.026
Sleman	240	3.792
Kota Yogyakarta	195	318
Kulon Progo	22	2.179
Gunung Kidul	81	1.086
Jawa Tengah	1.057	18.526
Klaten	1.041	18.127
Magelang	10	24
Boyolali	4	300
Sukoharjo	1	67
Wonogiri	-	4
Purworejo	1	4
Total	5.716	37.927

Sumber: Yogyakarta Media Center, 7 Juni 2006

Sumber : Laporan bersama BAPPENAS, Pemerintahan Provinsi dan Daerah D.I.Yogyakarta, Pemerintahan Provinsi dan Daerah Jawa Tengah, dan Mitra International, Juli 2006

Gempa bumi itu menewaskan lebih dari 5.700 orang, melukai puluhan ribu orang dan membuat ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Karena terjadi pada dini hari, gempa bumi itu membuat banyak orang terperangkap di dalam rumah. Berdasarkan informasi terbaru yang diterima, gempa bumi itu telah mengakibatkan lebih dari 5.700 korban jiwa. Penderita luka-luka diperkirakan berkisar antara 37.000 dan 50.000 orang dan ratusan ribu orang lainnya kehilangan tempat tinggal (BAPPENAS, 2006).

Dengan adanya korban jiwa dan luka-luka akibat gempa bumi di Yogyakarta maka diikuti dengan meningkatnya angka penyandang disabilitas dengan ragam disabilitas cacat fisik yang diakibatkan oleh gempa bumi tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan gempa terjadi pada pagi hari dengan kondisi masih banyaknya aktifitas yang masyarakat lakukan di dalam

rumah, khususnya bagi para ibu-ibu dan perempuan yang melakukan aktifitas di dapur. Perempuan banyak menjadi korban gempa baik itu meninggal dunia maupun korban dengan luka berat karena pada saat gempa terjadi, mereka banyak yang sedang berada di dapur untuk menyiapkan makanan untuk keluarga. Sementara itu, akses untuk menyelamatkan diri keluar rumah relatif jauh karena dalam konstruksi rumah di masyarakat Jawa, letak dapur berada di bagian paling belakang dari struktur rumah. Lebih jauh lagi, kondisi bangunan dapur relatif lebih buruk dan lebih rentan untuk ambruk dibanding dengan bangunan lain di dalam rumah seperti kamar tidur dan ruang tamu sehingga perempuan menjadi korban karena tidak sempat menyelamatkan diri. Pun ketika sedang tidak berada di dapur, perempuan pasti sedang berusaha menyelamatkan anak-anaknya sebelum menyelamatkan diri mereka sendiri sehingga waktu yang diperlukan untuk bisa selamat dari bencana tersebut semakin panjang sehingga banyak dari mereka dan anak-anak menjadi korban (Itriyati & Asriani, 2012, hal. 53-54).

Tabel 2. Jumlah Penderita Disabilitas menurut Jenisnya dan Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta tahun 2003-2013

Kabupaten/ Kota	Tuna Netra	Bisu/ Tuli	Cacat Tubuh	Cacat Mental	Penyakit Kronis	Ganda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	547	368	1210	1279	184	206
Bantul	659	547	1856	1739	178	371
Gunungkidul	1331	1131	3315	2138	505	514
Sleman	592	671	1741	2060	309	261
Yogyakarta	213	164	581	514	335	101
DIY 2013	3342	2881	8703	7730	1511	1453
2012	2568	2485	7772	6984	1272	1217
2011	3917	3425	9831	7989	2005	1943
2010	4636	3966	11389	9251	2166	2330
2009	4517	3921	11244	12120	2134	2345
2008	6233	5413	13225	11465	3078	1805
2007	3595	3453	9197	6394	1266	3232
2006	2384	2871	8122	5138	1266	2590
2005	2468	2015	6656	5779	1359	809
2004	3188	2637	8800	7606	1359	999
2003	3978	3926	6255	6392	1337	1103

Sumber: Dinas Sosial D. I. Yogyakarta tahun 2014

Sumber : Dinas Sosial D.I. Yogyakarta tahun 2014

Dengan meningkatnya penyandang disabilitas di Yogyakarta akibat dampak dari gempa bumi menjadikan banyaknya NGO-NGO internasional yang masuk dan terlibat langsung dalam penyelesaian isu disabilitas di Yogyakarta. NGO-NGO internasional yang masuk dan terlibat dalam penyelesaian isu disabilitas di Yogyakarta tidak hanya sebatas memberikan bantuan kemanusiaan, namun mereka juga melakukan serangkaian program jangka panjang dalam menangani para korban penyandang disabilitas. Pemulihan mental bagi para korban penyandang disabilitas baru maupun lama menjadi program utama NGO-NGO internasional pada waktu itu. Banyak dari para korban yang menderita trauma hebat pasca terjadinya gempa bumi yang melanda Yogyakarta pada

tahun 2006 tersebut. Setelah pemulihan mental para korban, NGO-NGO internasional memberikan program pelatihan bagi para penyandang disabilitas untuk mengembalikan kondisi perekonomian mereka yang tertinggal disebabkan oleh gempa bumi.

B. Kolaborasi CIQAL dengan NGO-NGO Internasional

CIQAL dalam melakukan proses advokasi dalam upaya mengatasi isu disabilitas bagi para penyandang disabilitas di Yogyakarta, menyadari bahwa tidak dapat melakukannya tanpa bantuan dari pihak luar yang lebih berpengalaman dan lebih teroganisir dalam mengatasi isu disabilitas. Oleh karena itu CIQAL melakukan suatu jaringan advokasi transnasional dengan NGO-NGO internasional dalam upaya mengadvokasi para penyandang disabilitas di Yogyakarta.

CIQAL telah melakukan kolaborasi dengan berbagai NGO-NGO internasional dengan berbagai program untuk mengadvokasi para penyandang disabilitas di Yogyakarta. Tercatat sepanjang CIQAL dalam melakukan Transnational Advocacy Network, CIQAL telah menjalin kolaborasi dengan 5 NGO internasional ; Australian Aid, USAID, Caritas Germany, Hendicap Internasional, dan Disability Rights Fund.

1. Australian Aid

Australian Aid adalah sebuah *Non-Governmental Organization* yang bergerak bersama-sama dalam membantu masyarakat mengurangi kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik dan lebih baik. *Australian Aid* telah memainkan peran dalam mewujudkan kemajuan besar dalam

membentuk dunia yang lebih adil dan setara. *Australian Aid* membuat perbedaan yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang di seluruh Australia, dan di seluruh dunia. Kampanye Bantuan Australia merupakan inisiatif bersama dari koalisi *Making Poverty History* dan *Micah Australia*, yang didukung oleh *Bill & Melinda Gates Foundation* untuk semua masyarakat Australia bahwa *Australian Aid* dapat dan harus berbuat lebih banyak sebagai sebuah negara untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem di seluruh dunia. Salah satu aksi *Australian Aid* adalah pemberdayaan perempuan, memberdayakan anak perempuan adalah kunci untuk mengakhiri kemiskinan, tetapi fakta di lapangan bahwa 130 juta anak perempuan tidak diberi pendidikan, hanya untuk menjadi anak perempuan biasa tanpa pendidikan yang layak (Aid, 2017). Dengan program pemberdayaan perempuan yang dimiliki *Australian Aid*, CIQAL melakukan kolaborasi untuk mengatasi masalah kekerasan seksual pada perempuan disabilitas di Yogyakarta. Kolaborasi CIQAL dengan *Australian Aid* telah berjalan sejak tahun 2014-sekarang dengan program utama yaitu, pendampingan perempuan terhadap kekerasan *sexual* bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta (Nuning, personal interview, 9 November 2017).

2. USAID

Kolaborasi kedua yang telah dilakukan CIQAL yaitu berkolaborasi dengan *developmentalist institutions* USAID. USAID adalah badan pemerintah Amerika Serikat terkemuka yang bekerja untuk mengakhiri

kemiskinan global yang ekstrim dan memungkinkan masyarakat demokratis yang tangguh untuk merealisasikan potensinya. Bantuan luar negeri Amerika Serikat selalu memiliki tujuan dua kali untuk melanjutkan kepentingan Amerika sambil memperbaiki kehidupan di negara berkembang. USAID melakukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan mempromosikan kemajuan manusia skala besar pada saat bersamaan, memperluas masyarakat yang stabil dan bebas, menciptakan pasar dan mitra dagang untuk Amerika Serikat, dan mendorong kemauan baik ke luar negeri. Menghabiskan kurang dari 1% dari total anggaran federal, USAID bekerja di lebih dari 100 negara untuk: Mempromosikan kemakmuran ekonomi bersama secara luas, Memperkuat demokrasi dan pemerintahan yang baik, Melindungi hak asasi manusia; Meningkatkan kesehatan global, Mengajukan ketahanan pangan dan pertanian; Meningkatkan kelestarian lingkungan, Pendidikan lebih lanjut; Membantu masyarakat mencegah dan memulihkan diri dari konflik, dan memberikan bantuan kemanusiaan setelah bencana alam dan buatan manusia (USAID, 2017). Kolaborasi CIQAL dengan USAID telah dilakukan pada tahun 2003-2009. Program utama yang telah dilakukan adalah penyuluhan dan peningkatan hak politik bagi kaum disabilitas. Program ini berkaitan dengan salah satu program utama USAID yaitu melindungi hak asasi manusia (Nuning, personal interview, 9 November 2017).

3. Caritas Germany

Saat ini CIQAL sedang melakukan kolaborasi dengan salah satu LSM Internasional Caritas Germany yang telah terkenal dengan kiprahnya dalam isu kemanusiaan salah satunya yaitu isu disabilitas. Caritas Germany yaitu sebuah asosiasi kesejahteraan terbesar di Jerman. Tujuan utama di jantung kerja Caritas adalah untuk memberikan bantuan nyata kepada orang-orang yang membutuhkan. Caritas memiliki lebih dari 25.000 pusat dan institusi di Jerman di mana orang bisa mendapatkan dukungan dan bimbingan profesional untuk membantu mereka mengatasi dan mengatasi masalah mereka. Layanan ini ditujukan untuk semua orang yang kurang beruntung secara sosial, terlepas dari warna kulit, agama atau kewarganegaraannya. Membantu Sebelas Juta Orang (Germany, 1987).

Orang yang menganggur, menderita AIDS, memiliki kecanduan zat, tidak memiliki rumah, dipenjara, atau sakit mental, atau orang-orang yang bermigrasi dari negara lain semua memanfaatkan layanan yang ditawarkan Caritas di pusat hari kita (rawat jalan / terbuka) dan tinggal di bagian dan pusat perawatan perumahan. Layanan ini juga dimanfaatkan oleh keluarga, anak-anak, orang dewasa muda, penyandang cacat, dan orang tua. Secara keseluruhan, kami membantu sekitar sebelas juta orang setiap tahun (Germany, 1987).

Saat ini kolaborasi CIQAL dengan Caritas Germany berfokus pada program Pemberdayaan Ekonomi Vokasional bagi

penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini merupakan kelanjutan dari program yang sama pada tahun 2010 dan 2011(Nuning, personal interview, 9 November 2017).

4. Hendicap International

CIQAL juga melakukan kerjasama dengan LSM internasional lainnya yaitu *Hendicap Internasional (HI)*. Hendicap International pertama kali menjalin kerjasama dengan CIQAL terjadi pada tahun 2006, dimana pada saat itu Yogyakarta dilanda gempa bumi tektonik dahsyat yang telah menyedot perhatian dunia Internasional salah satunya adalah *Hendicap Internasional*. Gempa Bumi Yogyakarta menjadi tolok ukur kerjasama yang dilakukan CIQAL dengan *Hendicap International* dari tahun 2006-sekarang.

Handicap International adalah organisasi solidaritas internasional nonpemerintah, yang didirikan pada tahun 1982 di Lyon, Perancis. Bagian Prancis adalah asal mula gerakan internasional, dengan bagian-bagian sekarang ada di Belgia, Swiss, Jerman, Luxemburg, dan Kerajaan Inggris dan representasi di Denmark dan Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang penyandang cacat dapat memperoleh kembali kemandirian mereka dan tempat mereka di masyarakat, terutama di negara-negara dengan kondisi hidup yang sulit. The Blue Laces adalah simbol dari ini. Organisasi ini aktif di berbagai bidang yang terkait dengan semua penyebab kecacatan, baik traumatologis (misalnya, ranjau darat,

kecelakaan di jalan) dan infeksi (misalnya, polio, lepra). Handicap International bekerja terutama di negara-negara yang sedang mengalami situasi krisis akut atau kronis.

Kegiatannya secara sistematis didasarkan pada pendekatan tiga bagian: pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial-ekonomi. Pencegahan: Mencegah kecacatan, misalnya, dengan pembersihan ranjau dan penghilangan persenjataan perang yang tidak diledakkan, kampanye keselamatan jalan, dan pencegahan cedera yang disebabkan oleh penularan penyakit seperti kusta dan polio. Rehabilitasi: Menyiapkan pusat rehabilitasi fisik dan rehabilitasi dan menawarkan bantuan teknis yang diperlukan, fisioterapi, dan program rehabilitasi. Reintegrasi: Memfasilitasi reintegrasi orang-orang dengan kecacatan ke dalam lingkungan sosial mereka dengan menawarkan pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan cara yang ditargetkan, mempromosikan reintegrasi sosial, dan meningkatkan hak-hak orang dengan handicap. Handicap International bekerja dengan mitra lokal dan badan pemerintah dalam kerangka kerja kontraktual dan membantu mereka untuk mengambil alih proyek setelah jangka waktu tertentu.

Tujuh puluh persen sumber keuangan berasal dari dana institusi dan 30 persen dari sumbangan pribadi. Kegiatannya dimulai pada tahun 1982 ketika pusat ortopedi pertama dibuka di kamp-kamp pengungsi di Kamboja, Thailand, Myanmar (sebelumnya Burma), dan Laos untuk membantu

beberapa ribu orang yang diamputasi. Penggunaan bahan sederhana dan tersedia secara lokal adalah salah satu kekuatan utama yang memungkinkan Handicap International untuk memberikan bantuan cepat dan efisien dan melatih tim lokal yang kompeten. Pada tahun 1986, organisasi menyadari bahwa memberikan anggota badan buatan tidak cukup, dan akibatnya, ia bergerak ke arah pendekatan yang lebih global terhadap kecacatan dengan menciptakan jaringan pekerja pendidikan lokal dan memperkuat kelompok keluarga dan masyarakat.

Pada awal tahun 1990-an, masalah disabilitas menjadi semakin luas untuk mencakup orang-orang dalam situasi pengucilan dan kerentanan. Tindakan untuk mencegah kecacatan dilakukan. Handicap International mulai menangani masalah cacat mental sebagai akibat dari pengalaman dengan panti asuhan Rumania dan perang di Balkan. Pada tahun 1992, organisasi ini menciptakan dua program pembersihan ranjau pertama di Kamboja dan Kurdistan dan mengambil bagian dalam pembentukan kampanye internasional untuk melarang ranjau darat. Periode 1993-1995 dicirikan oleh pengembangan kemitraan, baik lokal maupun internasional. Pusat ortopedi dan fisioterapi nasional dibuka di berbagai negara. Pelatihan yang mengarah ke gelar didirikan di Kamboja, Mozambik, dan Afrika Barat. Antara tahun 1996 dan 2002, Handicap International mengambil bagian dalam pengembangan kebijakan

nasional yang mendukung penyandang disabilitas.

Pada tahun 1996, organisasi menerima Hadiah Nansen, hadiah tertinggi yang diberikan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi. Titik tinggi dalam sejarah organisasinya, organisasi ini adalah pemenang bersama dari Harga Nobel Perdamaian 1997 untuk peran utamanya dalam perang melawan ranjau darat.

5. Disability Rights Fund (DRF)

Disability Rights Fund (DRF) merupakan kolaborasi hibah antara donor dan komunitas hak disabilitas global yang memberdayakan para penyandang cacat untuk mengadvokasi hak-hak yang sama dan partisipasi penuh dalam masyarakat. Disability Rights Fund menorganisasi sumber daya yang dipimpin oleh penyandang cacat, terutama di Afrika, Asia, Kepulauan Pasifik, dan Karibia, yang memimpin upaya untuk mengamankan hak untuk semua. Melalui hibah, advokasi, dan bantuan teknis, Disability Rights Fund dan Dana Advokasi Hak Penyandang Cacat mendukung Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO) untuk menggunakan kerangka kerja hak dan pengembangan global, seperti Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Fund, 2018).

Ranah kerja Disability Rights Fund yaitu, mempromosikan perubahan kunci dalam sikap, lingkungan, dan kerangka kerja hak yang didukung oleh Konvensi

Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Sejak 2008, Disability Rights Fund dan organisasi kembarnya, International Disability Community telah mendanai organisasi penyandang cacat di seluruh dunia berkembang untuk berpartisipasi dalam ratifikasi, implementasi, dan pemantauan CRPD (Fund, 2018).

Sebagai dana gabungan, Dana Hak Disabilitas: Menggabungkan sumber daya dari berbagai donor pemerintah, swasta, dan publik ; Memungkinkan donor untuk menyelaraskan upaya mereka terhadap pendanaan inklusif penyandang cacat ; Mencapai organisasi akar rumput yang tidak dapat dijangkau oleh donor yang lebih besar ; Memfasilitasi umpan balik tentang investasi donor di bidang hak asasi manusia dan pembangunan yang terabaikan ini ; Menunjukkan hasil pembangunan yang inklusif disabilitas. Model hibah partisipatoris unik dari Disability Fund menggabungkan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan, menetapkan dana sebagai kendaraan hibah inovatif yang beroperasi bersama dengan slogan komunitas disabilitas, "tidak ada apa-apa tentang kita tanpa kita" (Fund, 2018).

Menyadari dampak potensial dari kerangka hak asasi manusia global pada kelompok minoritas terbesar di dunia, Disability Rights Fund dikonseptualisasikan sebagai tanggapan terhadap jendela peluang yang dibuka oleh Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD). CRPD adalah perjanjian hak asasi manusia komprehensif pertama pada abad ke-21. Ini

mendorong perubahan dari memperlakukan penyandang disabilitas sebagai "objek" dari amal, perawatan medis dan perlindungan sosial, untuk mengenali penyandang disabilitas sebagai "subyek" dengan hak, yang mampu secara aktif membuat keputusan tentang kehidupan mereka sendiri. Pada tahun 2008, setelah proses penyusunan kerangka kerja kolaboratif antara donor dan komunitas cacat internasional, Dana Hak Disabilitas mulai beroperasi sebagai dana gabungan dari beberapa donor di bawah Pusat Tides (Fund, 2018).

Pada 2012, Disability Rights Fund, dan organisasi kembarnya, Dana Advokasi Hak Kecacatan, memulai operasi sebagai organisasi nirlaba. Sejak awal, DRF telah memperluas pekerjaannya dari tujuh negara percontohan awal menjadi 32 negara di enam wilayah di dunia. Sejalan dengan pekerjaan kami, negara-negara mengambil tindakan - pada tahun 2008, hanya 20 negara yang telah meratifikasi CRPD. Hingga Juli 2017, 174 negara telah meratifikasi. Orang-orang dengan disabilitas sedang dilihat dan didengar tidak seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya penyandang disabilitas dimasukkan dalam kerangka pembangunan global - Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pendanaan DRF memastikan bahwa penyandang cacat di seluruh negara berkembang akan menjadi peserta aktif dalam pencapaian tujuan ini (Fund, 2018).

Tabel 3. Daftar Kolaborasi CIQAL dengan beberapa NGO Internasional

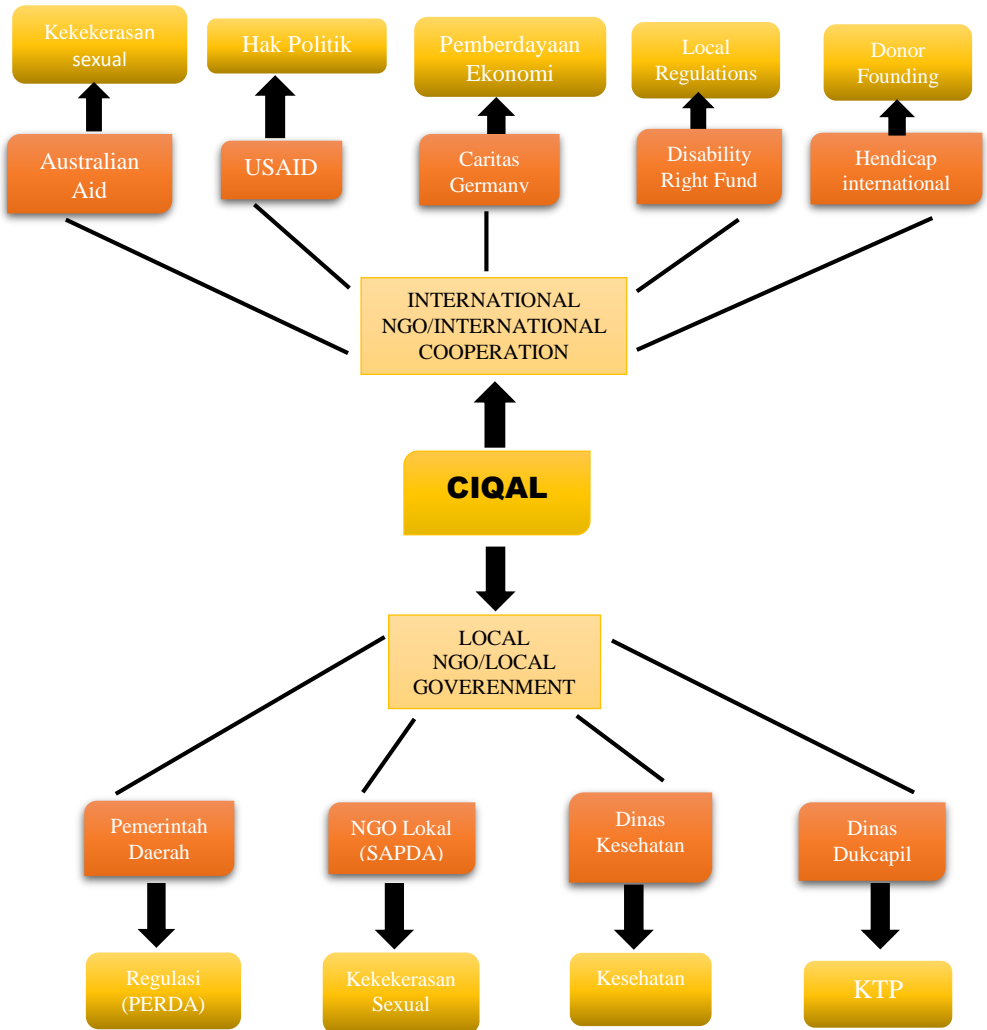
Tahun	Program	INGO	Wilayah
2003-2009	Program penyuluhan dan peningkatan hak politik bagi kaum disabilitas	USAID	D.I. Yogyakarta
2006-2007	Program Tanggap Darurat Dan Program Pemulihan Korban Bencana Gempa Bumi Di Yogyakarta	Handicap Internasional	Kabupaten Bantul dan Sleman Yogyakarta
2010-2014	The Economic Empowerment Program of People with Disabilities in Bantul Regency, Yogyakarta, Indonesia	Caritas Germany	D I Yogyakarta Meliputi 17 kecamatan di Kabupaten Bantul
2010	Program Tanggap Darurat Dan Program Pemulihan Korban Bencana Gunung Merapi Di Yogyakarta	Handicap Internasional	Kabupaten Sleman Yogyakarta
2011-2012	Awareness Raising of rights of disabled people at Disabled People Organization in Yogyakarta Special Territories Province in Indonesia	Handicap Internasional	D I Yogyakarta
2012-2013	The Participation Improvement of Disabled People Organization/DPO in monitoring the efforts to increase, respect, and fulfill the rights of persons with disabilities in Yogyakarta Special Province	Handicap Internasional	D I Yogyakarta
2013-2014	DPO participation in monitoring on the promotion, respect and fulfill of the right to education and employment of persons with disabilities efforts by the Government of Yogyakarta Special Region	Handicap Internasional dan AIPJ Australia	Yogyakarta
2014	Advocating for Change for Persons with Disabilities. To contribute to improved access to social and economic rights for persons with disabilities in Indonesia and Timor Leste	Handicap Internasional	DIY (Gunung Kidul), NTT (Kabupaten Kupang) dan Timor Leste.

2014 - 2018	“Pemulihan Transformatif: dari Inisiatif Komunitas menjadi Tanggung jawab Negara” Pendampingan korban kekerasan seksual penyandang disabilitas dan advokasi kebijakan terkait korban kekerasan seksual	Australian Aid	Daerah Istimewa Yogyakarta
2014-2015	Peningkatan Partisipasi Organization Penyandang Disabilitas / DPO dalam melakukan strategi advokasi dan monitoring penyerapan anggaran dalam upaya peningkatan, menghormati, dan memenuhi hak-hak para penyandang cacat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Handicap Internasional	Daerah Istimewa Yogyakarta
2014-2015	Mid Level Coalition Program In Drafting And Advocacy Local Regulation/PERDA “Protection And Fulfillment Of Human Rights Of Persons With Disabilities” In 5 (Five) Regency/City In Yogyakarta Special Region	Disability Right Fund	Daerah Istimewa Yogyakarta
2015	Penyusunan Tool Dan Manual Monitoring Anggaran Daerah Bagi penyandang disabilitas	Handicap Internasional	Daerah Istimewa Yogyakarta
2015-2016	Mid Level Coalition Program In Drafting And Advocacy Local Regulation/PERDA “Protection And Fulfillment Of Human Rights Of Persons With Disabilities” In 5 (Five) Regency/City In Yogyakarta Special Region	Disability Right Fund	Daerah Istimewa Yogyakarta
2016-2018	Advocating for Change Pelatihan Konvensi dan Pembangunan Inklusif untuk Strategi Advokasi Berbasis Bukti	Handicap Internasional	Yogyakarta dan NTT (Program dilakukan pada mulai dari tingkat desa, kabupaten, propinsi)
2016-2018	Mid Level Coalition Program Advocation for Implementation of “Disaster Risk Reduction Education” As Extracurricular Activities at Inclusive Schools and Special Schools in Indonesia	Disability Right Fund	DIY, Banjarmasin
2017 - 2018	Advokasi kebijakan untuk keadilan sosial dan inklusi bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman	Disability Right Fund	Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman dan Desa Sinduadi, Mlati, Sleman.

Sumber : Data dari CIQAL

Menurut tabel diatas dapat disimpulkan bahwa CIQAL memiliki jaringan advokasi transnasional yang cukup luas dalam upaya advokasi para penyandang disabilitas di Yogyakarta. CIQAL dan NGO-NGO internasional tersebut melakukan serangkaian program untuk memberdayakan dan meningkatkan mutu kualitas hidup para penyandang disabilitas di Yogyakarta bahkan hingga di luar kota Yogyakarta.

Tabel.1 Bentuk Kolaborasi CIQAL



Sumber : Tim Penulis mengumpulkan dari beberapa sumber yang ada

C. Dampak dari Kolaborasi CIQAL dengan NGO-NGO Internasional

Dengan adanya kolaborasi yang telah dilakukan CIQAL dengan NGO-NGO Internasional akan memunculkan impact atau dampak bagi para penyandang disabilitas, CIQAL, pemerintah, dan masyarakat umum. Secara umum yang akan merasakan dampak dari adanya kolaborasi ini yaitu para penyandang disabilitas itu sendiri. Program-program yang telah CIQAL dan NGO-NGO internasional lakukan kebanyakan merupakan program jangka panjang yang memerlukan monitoring dan tindak lanjut secara berkelanjutan agar menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan (Nuning, personal interview, 11 April 2018).

CIQAL dalam melakukan upaya advokasi cenderung lebih memfokuskan ketingkat desa-desa di Yogyakarta, karena menurut CIQAL lingkup desa yang lebih kecil serta intensitas penyandang disabilitas dalam beraktifitas dengan aparat desa dan masyarakat desa lebih intens daripada masyarakat lingkup kota. Oleh karena itu target utama CIQAL dengan NGO-NGO internasional yaitu para aparat desa untuk memberikan perhatian lebih dari segi aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas yang tinggal di desa-desa (Nuning, personal interview, 11 April 2018).

Terdapat dua impact utama setelah CIQAL melaukan kolaborasi dengan NGO-NGO internasional. Impact pertama yaitu dalam impact bentuk fisik, maksudnya ialah adanya peningkatan dalam segi aksesibilitas baik dari sarana dan prasarana, serta undang-undang yang mengatur tentang para penyandang disabilitas. Telah terbukti dengan nyata impact dari adanya kolaborasi tersebut yaitu telah dibuat dan disahkannya peraturan daerah (perda) di 4 Kabupaten di Yogyakarta dan peraturan

pemerintah (permen) Provinsi D.I. Yogyakarta. Ke empat Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman. Peraturan Daerah (Perda) Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan jumlah pasal 63 buah pasal. Sedangkan Peraturan Daerah (Perda) Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas dengan jumlah pasal 60 buah pasal. Selanjutnya Peraturan Daerah (Perda) Gunung Kidul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan jumlah pasal 60 buah pasal. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Daerah (Perda) Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan jumlah pasal 113 buah pasal. Dengan adanya dorongan CIQAL bersama NGO-NGO Internasional kepada pemerintah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, maka terwujudlah peraturan perundang-undangan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Yogyakarta. CIQAL menurut tipologi LSM Philip Eldridge merupakan LSM pembangun atau Development NGO. CIQAL dalam prakteknya memberikan dukungan dan dorongan kepada pemerintah dalam melakukan advokasi terhadap para penyandang disabilitas di Yogyakarta dalam bidang pembangunan baik dari fisik maupun non-fisik (Nuning, personal interview, 11 April 2018).

Kolaborasi CIQAL dengan NGO-NGO Internasional juga telah menghasilkan banyaknya aksesibilitas dalam bentuk sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta. Contohnya seperti, telah banyaknya fasilitas umum di

Yogyakarta yang dapat digunakan bagi penyandang disabilitas seperti toilet dan lift khusus bagi penyandang disabilitas (Nuning, personal interview, 11 April 2018).

Impact kedua, yaitu berupa dampak non-fisik maksudnya ialah meningkatnya kesadaran masyarakat umum serta pemerintah daerah atau awareness terhadap isu disabilitas di Yogyakarta. Contohnya, menurunnya tingkat diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Yogyakarta. Berubahnya cara pandang dan paradigma masyarakat umum terhadap penyandang disabilitas juga merupakan dampak non-fisik (Nuning, personal interview, 11 April 2018).

Contoh lain impact dengan telah dilakukannya kolaborasi CIQAL dengan salah satu NGO internasional yaitu USAID dalam program penyadaran hak politik bagi para penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas telah dapat menentukan sikap tentang hak politik yang mereka miliki serta sadar akan hak politik mereka. Mereka tidak lagi dapat dimobilisasi oleh suatu oknum tentu dalam menggunakan hak politik mereka. Dalam hal fisik, fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu sudah mulai diperhatikan. Para penyandang disabilitas telah diberikan kemudahan akses untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk dapat menggunakan hak politik mereka. Pemerintah khususnya Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) telah memberikan kemudahan akses berupa pendataan bagi penyandang disabilitas dengan cara jemput bola atau datang langsung ke rumah para penyandang disabilitas dengan berbagai ragam yang mereka miliki. Hal ini tentu sangat membantu para penyandang disabilitas agar tercatat dalam kependudukan dan dapat menggunakan hak-

hak mereka termasuk juga hak politik didalamnya (Nuning, personal interview, 11 April 2018).

Sedangkan impact dari adanya kolaborasi CIQAL dengan Australian Aid dengan program utama yaitu pendampingan perempuan terhadap kekerasan *sexual* bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta, yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat umum untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami oleh para perempuan penyandang disabilitas. Masyarakat umum menjadi lebih berani dan tegas dalam melawan kekerasan seksual bagi perempuan penyandang disabilitas di Yogyakarta. Kolaborasi CIQAL dengan Caritas Germany memiliki tindak lanjut berupa kerjasama CIQAL dengan beberapa perusahaan, rumah makan, dan berbagai usaha yang membutuhkan tenaga kerja. Bentuk kerjasama CIQAL dengan beberapa perusahaan adalah menawarkan tenaga kerja sesuai dengan apa yang perusahaan butuhkan untuk dipekerjakan, agar CIQAL dapat memberikan pemberdayaan ekonomi vokasional dengan cara memeberikan training kepada para penyandang disabilitas agar terlatih sesuai dengan apa yang perusahaan butuhkan (Nuning, personal interview, 11 April 2018).